

RINGKASAN

Pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah masih menjadi persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina tetap dapat dinikahi dan akad nikahnya sah, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali pada umumnya tidak membolehkan pelaksanaan akad nikah sebelum perempuan tersebut melahirkan atau memenuhi syarat tertentu. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status nasab anak, perwalian, dan hak kewarisan. Dalam pelaksanaannya, penghulu memiliki peran penting dalam menerapkan ketentuan tersebut ketika menangani permohonan perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih mengenai pernikahan perempuan hamil di luar nikah serta menganalisis pertimbangan penghulu dalam melaksanakan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala KUA, penghulu, serta pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum pernikahan perempuan yang hamil di luar nikah. Dalam praktiknya, penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara berpedoman pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam serta berpedoman pada pandangan ulama imam syafi'i yang memperbolehkan pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Penerapan ketentuan tersebut juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan perempuan dan anak, serta kondisi sosial masyarakat. Pelaksanaan pernikahan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang telah terjadi. Adapun akibat hukumnya berkaitan dengan status nasab anak, perwalian dalam perkawinan, dan hak-hak keperdataan anak, yang tetap mengacu pada Kompilasi Hukum Islam serta pendapat Imam Syafi'i sebagai salah satu rujukan fikih munakahat.

Kata Kunci : penghulu, pernikahan, wanita hamil, hukum Islam, perwalian.

SUMMARY

Marriage involving women who become pregnant outside marriage has given rise to differing opinions among Islamic jurists. Imam Abu Hanifah and Imam al-Shafi'i permit such marriages, whereas Imam Malik and Imam Ahmad ibn Hanbal require that the woman first give birth or fulfill specific conditions before the marriage may take place. In Indonesia, Compilation of Islamic Law (KHI), particularly Article 53, allows a woman who is pregnant outside marriage to marry the man responsible for the pregnancy. This issue is closely related to the validity of the marriage, the child's lineage (nasab), guardianship, and the civil rights arising from the marriage. In practice, marriage registrars (penghulu) play a significant role in determining the implementation of such marriages based on the applicable legal provisions. This study aims to analyze the Islamic jurisprudential perspectives on the marriage of women who become pregnant outside marriage and to examine the considerations employed by marriage registrars in conducting such marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) of North Purwokerto District.

This research employed a field research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Head of KUA, marriage registrars, and other related parties. The data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that there are differences of opinion among Islamic scholars regarding the law on marriage for women who are pregnant out of wedlock. In practice, marriage registrars at the Office of Religious Affairs (KUA) of Purwokerto Utara District refer to Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which permits the marriage of a pregnant woman to the man who caused the pregnancy. The implementation of this provision is also based on considerations of public benefit (maslahah), protection of women and children, and the social conditions of society. The marriage is conducted to provide legal certainty for the existing relationship so that it has a clear legal basis. The legal consequences relate to the child's lineage (nasab), guardianship in marriage (wali nikah), and the child's civil rights, all of which remain subject to the provisions of Indonesian positive law, particularly the KHI and the views of Imam Shafi'i as one of the main references in Islamic family law (fiqh munakahat).

Keywords : marriage registrar, marriage, pregnant woman, Islamic law, guardianship.